

ABSTRAK

Komando Operasi Khusus Gabungan (Koopssusgab) Tentara Nasional Indonesia merupakan lembaga yang diciptakan untuk mendukung tugas pokok TNI dalam melakukan pencegahan dan pemberantasan tindak pidana terorisme. Pelibatan TNI mengatasi aksi terorisme telah diatur dalam Undang - Undang Nomor 15 Tahun 2003 jo Undang - Undang Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme yang merupakan bagian dari tugas pokok operasi militer selain perang (OMSP) yang harus berdasarkan adanya peraturan presiden dan kebijakan politik yang mengatur. Kewenangan yang dimiliki oleh TNI telah menimbulkan banyak kekhawatiran publik mengenai teknis pelibatan TNI dalam mengatasi aksi terorisme, bentuk operasional apa yang digunakan, dan bagaimana bentuk pertanggungjawaban atas pelanggaran yang dilakukan oleh TNI. Penelitian ini ditulis untuk menganalisis batas kewenangan Koopssusgab dalam melakukan pencegahan dan pemberantasan tindak pidana terorisme dalam melakukan tugas pokok OMSP. Tipe penelitian yang digunakan adalah penelitian normatif dengan pendekatan perundang - undangan dan pendekatan konseptual. Hasil dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa kewenangan pelibatan Koopssusgab TNI untuk mengatasi aksi terorisme merupakan tugas pokok TNI yang hanya sebagai tugas perbantuan dalam melakukan OMSP berupa penangkapan ketika ancaman teror sudah berada pada ancaman yang berekskalasi tinggi dan penangkapan yang dilakukan oleh TNI haruslah bersifat profesional sesuai dengan pelaksanaan teknis, jika TNI dalam melakukan penangkapan yang tidak sesuai dengan pelaksanaan teknis bentuk pertanggungjawaban tunduk pada Kitab Undang - Undang Hukum Acara Pidana Militer dan Kitab Undang - Undang Hukum Pidana Militer

Kata kunci : Terorisme, Kewenangan TNI, OMSP, Lembaga Koopsusgab

ABSTRACT

Komando Operasi Khusus Gabungan (Koopsusgab) TNI is an institution which created to support the main function of TNI in the prevention and eradication of terrorism. The involvement of TNI in dealing with terrorism has been regulated under the Law No. 15 Year 2003 jo. Law No. 5 Year 2018 on Eradication of Terrorism Crimes. The military function to deal with terrorism is the part of the main function of military operations other the war (OMSP) which must be based on Presidential Regulations and political policies. The authority of Koopsusbag TNI has caused public regarding the technical involvement of TNI in dealing with terrorism. Unrest the public concerns on what form of operations are used, and how was the responsibility for violations which done by TNI. This research analyses the limits of the authority of Koopsusgab TNI in the prevention and eradication of terrorism. The type of this research is normative research using statute approach and conceptual approach. The results of this research shows that the authority of Koopsusgab TNI in dealing with terrorism is the TNI's main function, as an assistance function of OMSP. The real form of this function is an arrest by TNI in a high escalation threat of terror. The arrest which done by TNI must be professional and based on the technical implementation. The orrest conducted by TNI must be inline with the technical implementation, otherwise the TNI must be responsible to their conduct based on the military criminal procedural code or the military criminal code.

Keywords: *Terrorism, The authority of TNI, OMSP, Koopsusbag Institution.*